



## Analisis Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat

**Fatimah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek

E-mail: [fatimahimah512@gmail.com](mailto:fatimahimah512@gmail.com)

**Tartila Devy**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek

E-mail: [tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id](mailto:tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to determine the role of PBB on economic growth in Kab. West Passage. The type of research used in this research is qualitative. The data processed in this study is PBB revenue for 2016-2021. Based on the results of the research, it shows that the role of PBB In economic growth in West Pasaman Regency is still very small. Where this can be seen from the PBB contribution to PAD from 2016 to 2021 an average of 2,4%, which means there is very little contribution. This is due to the low public awareness in paying PBB in West Pasaman Regency. So that the realization of PBB is not always achieved. PBB is very influential in increasing PAD, but in fact the PBB is very low. Where it can be seen that the role of PBB on Economic Growth in West Pasaman Regency can be seen by the receipt of PAD. PAD funds will be allocated for smooth development.*

**Keywords:** *public awareness, role, land and building tax, Local own revenue, and economic growth*

**Abstrak.** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran PBB pada pertumbuhan ekonomi di Kab. Pasaman Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah penerimaan PBB tahun 2016- 2021. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan peran PBB pada pertumbuhan ekonomi di Kab. Pasaman Barat masih sangat kecil. Dimana hal ini dilihat dari kontribusi PBB pada pendapatan asli daerah tahun 2016-2021 rata-rata 2,4%, artinya kontribusinya kurang. Hal ini di karenakan rendahnya kesadaran masyarakat membayar PBB di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga Realisasi PBB tidak tercapai sesuai ketentuan. PBB berpengaruh pada peningkatan PAD, namun kenyataanya PBB sangat rendah. Dimana hal ini dapat dilihat bahwa Peran PBB terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dengan penerimaan PAD. Dana PAD akan dilaokasikan untuk kelancaran pembangunan.

**Kata Kunci:** Kesadaran masyarakat, Peran, Pajak Bumi dan Bangunan, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi

## **PENDAHULUAN**

Dalam kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi berarti pertambahan produksi barang modal. Tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan pendapatan perkapita) yang signifikan selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat rencana untuk pendapatan dan pembangaunan di masa depan. Sebaliknya, bagi pengusaha, pertumbuhan ekonomi sebagai pondasi dalam perencanaan pembangaunan.

Keberhasilan pemerintah tercermin dari pertumbuhann ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian karena menunjukkan keberhasilan pemerintah dan pegawainya dari waktu ke waktu. Dan dimana kebijakan fiskal adalah alat yang berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah keputusann yang diambil negara untuk mengendalikan pengeluaran dan pajak dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran ekonomi masyarakat. Dan sumber pembiayaan kegiatan pembangaunan berasal dari sector pajak, khususnya PBB yang sebelumnya dikenal dengan pembangaunan daerah.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini difokuskan pada analisis peran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat di simpulkan bahwa realisasi dan target pajak bumi dan bangunan di Kab. Pasaman Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tidak pernah mencapai target 100%. Dimana pada tahun 2016 target sebesar 2.383.553.263 dan hanya terealisasi sebesar 1.297.549.256, dan pada tahun 2017 target sebesar 2.460.417.052 dan terealisasi sebesar 1.343.515.909 sedangkan pada tahun 2018 dengan target 2.929.818.826 dan terealisasi sebesar 1.516.747.994. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, terutama PBB.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka yang digunakan adalah kajian yang berhubungan pada pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah terhadap pajak bumi dan bangunan.. Dimana pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan menghasilkan barang prekonomian dari segala segi, yang dinyatakan sebagai peningkatan pendapatan nasional..

Pengertian dari pendapatan asli daerah adalah penerimaan bidang pajak, dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan investasi daerah yang disahkan. Pandangan lain menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan keseluruhan yang berasal dari ekonomi daerah.

Pajak daerah seperti pendapatan asli daerah diharapkan akan menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah, dengan tujuan meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, daerah dapat menerapkan prinsip otonomi yang artinya dapat mengendalikan dan mengurus wilayahnya sendiri. Penerimaan pajak daerah antara lain: *Pertama* pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang didasarkan pada bumi dan bangunan. dikenakan atas objek kena pajak seperti tanah dan bangunan. Ditinjau dari pengumpulannya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semula milik kantor pusat. Kemudian telah ditentukannya dalam suatu UU nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah dan pajak daerah, mengubah pajak properti dan konstruksi desa dan kota menjadi pajak daerah. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 dan UU 12 Tahun 1994 tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dan dasar penetapan PBB adalah "Nilai Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota setempat. *Kedua* Pajak Penerangan Jalan. Menurut peraturan yang berlaku, pajak kabupaten yang menjadi tanggung jawab kabupaten adalah pajak lampu jalan. Pajak lampu jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Pajak lampu jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Dan *ketiga* Pajak reklame merupakan pendapatan daerah yang dimungkinkan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Derajat otonomi fiskal daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan otonomi daerah secara menyeluruhan. Menurut Radianto, hal ini karena derajat otonomi fiskal merepresentasikan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan

PAD kemudian kemampuan dalam memungut pajak, karena menurut Bahl secara teoritis pemda memiliki pembangunan disana. Analisis yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi pajak daerah adalah “*administrative independency ratio*” yaitu tingkat kemandirian pemerintah antara rasio PAD terhadap total penerimaan APBD.

Salah satu alat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini, bersama kebijakan lainnya diperlukan untuk menghilangkan kemacetan yang menghambat roda perekonomian.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, dan observasi.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Aset dan Pengelolaan Daerah (BAPD) Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam bahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena social yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data dikumpulkan dari data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pertumbuhan Ekonomi yang telah di sediakan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BAPD) dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021**

Total pendapatan asli daerah di Kab. Pasaman Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Tabel .1**

**Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman  
(Dalam Rupiah)**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi dalam (jutaan rupiah)</b>	<b>Realisasi dalam (%)</b>
<b>1.</b>	2016	91.099.048.440,57	116,79
<b>2.</b>	2017	16.510.315.194,40	19,85
<b>3.</b>	2018	104.523.535.551,25	71,09
<b>4.</b>	2019	104.071.607.688,23	72,86
<b>5.</b>	2020	108.856.844.190,82	96,46
<b>6.</b>	2021	136.994.002.380,38	113,21

*Sumber: BAPD Pasaman Barat*

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijabarkan sesuai total realisasi (PAD) Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kab. Pasaman Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, dari tahun 2016 - 2021. Pada tahun 2017 terjadi kemerosotan pendapatan asli. Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah sebesar 116,79% dari total yang ditentukan. Namun pada tahun 2017 turun menjadi 19,85% dari pencapaian, tahun 2018 mengalami kenaikan 71,09% dari jangka pendapatan. Sedangkan tahun 2019-2021 mengalami kenaikan pendapatan di atas pencapaian yang sudah ditetapkan yaitu 72,86 %, 96,46% dan 113,21%.

**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat tidak pernah mencapai target**

**Tabel .2**

**Efektivitas Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi %
1	2016	2.383.553.263	1.297.549.256	54,43
2	2017	2.460.417.052	1.343.515.909	54,61
3	2018	2.929.818.826	1.516.747.994	51,77
4	2019	3.202.752.465	1.643.350.307	51,31
5	2020	865.500.624	551.978.337	63,78
6	2021	3.522.598.754	2.330.196.734	66,15

*Sumber: BAPD Kabupaten Pasaman Barat*

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diuraikan mengenai efektivitas pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kab. Pasaman Barat selama 6 tahun dari tahun 2016 - 2021. Pada tahun 2016, perolehan PBB sebesar 54,43% dari total pencapain. Tahun 2017 meningkat 54,61%, 2 tahun selanjutnya mengalami penurunan kembali sebesar 51,77% dan 51,31% dari tahun 2018-2019. Sedangkan dari tahun 2020 sampai 2021 peningkatan cukup pesat dari sebelumnya yaitu sebesar 63,78%, dan 66,15%. Jadi total efektivitas perolehan PBB yaitu 57% artinya tingkat efektivitas antara realisasi dan target perolehan belum stabil.

## Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pasaman Barat

**Tabel .3**

### **Klasifikasi Kreteria Kontribusi Pajak Bumi (PBB) dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Pasaman Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PBB</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Tingkat Kontribusi (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2016</b>	1.297.549.256	91.099.048.440,57	1,4	Sangat kurang
<b>2017</b>	1.343.515.909	16.510.315.194,40	8,1	Sangat kurang
<b>2018</b>	1.516.747.994	104.523.535.551,25	1,4	Sangat kurang
<b>2019</b>	1.643.350.307	104.071.607.688,23	1,5	Sangat kurang
<b>2020</b>	551.978.337	108.856.844.190,82	0,5	Sangat kurang
<b>2021</b>	2.330.196.734	136.994.002.380,38	1,7	Sangat kurang
	<b>Rata-rata</b>		<b>2,4</b>	<b>Sangat kurang</b>

*Sumber: BAPD Kabupaten Pasaman Barat*

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditinjau kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Pasaman Barat dari 2016 sampai tahun 2021. Perolehan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami kemerosotan, dimana total perolehan PBB yaitu 2,4%, berarti kontribusinya sangat minim. Pada tahun 2016 kurangnya kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah sehingga perolehan daerah hanya mencapai 1,4% dibandingkan tahun 2017 yaitu 8,1%, artinya masih jauh dari pencapaian daerah.

Tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut pajak bumi dan bangunan mengalami kemerosotan dibanding tahun sebelumnya hanya 1,4% dan 1,5%. Kemerosotan terjadi kembali pada tahun 2020 sebesar 0,5%, sementara tahun 2021 juga mendapati kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,7%. Hal ini kurangnya kontribusi PBB kepada pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan pendapatan daerah tidak sesuai dengan pencapaian.

Menurut penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kab. Pasaman Barat mesti meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah, sehingga pajak bumi dan bangunan lebih bisa mengimbangi peningkatan dari sumber pendapatan asli daerah lainnya. Adanya kenaikan yang signifikan maka bisa

menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan pendapatan asli daerah Kab. Pasaman Barat.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pendapatan asli daerah dengan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2016 sampai 2021 juga berada pada interval sangat kurang baik, karena berada pada interval 0,00%-10,00%. Sehingga dapat di katakana bahwa pemerintah lokal bisa jadi didominasi oleh pemerintah pusat dan daerah kemungkinan kehilangan kredibilitas seperti kedaulatan.

## **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

### **Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu piranti dalam pembiayaan pembangunan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan memberikan layanan yang cukup baik bagi pendapatan asli daerah. Tapi dari hasil penelitian dilihat bagaimana pelayanan PBB (pajak bumi dan bangunan) terhadap PAD (pendapatan asli daerah) Kab. Pasaman Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Pendapatan (PBB) pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami kemerosotan, di sebabkan karena kurangnya kontribusi, sehingga semua total penerimaan (PBB) pajak bumi dan bangunan adalah 2,4%.

Rata-rata kontribusi yang diberikan (PBB) pajak bumi dan bangunan terhadap (PAD) pendapatan asli daerah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2021 adalah sebesar 2,4%. Demikian, (PBB) pajak bumi dan bangunan yang dikumpulkan oleh BAPD (badan asset dan pendapatan daerah) Kabupaten Pasaman Barat memiliki fungsi dan kontribusi yang sangat minim kepada pendapatan asli daerah (PAD).

### **Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Pasaman Barat yang Tidak Pernah Mencapai Target.**

Pada tahun 2016-2021 realisasi penerimaan PBB (pajak bumi dan bangunan) di Kabupaten Pasaman Barat secara umum perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB) belum bisa mencapai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Awal tahun 2016 dan tahun selanjutnya, PBB (pajak bumi dan bangunan) tidak pernah mencapai pendapatan yang ditentukan sehingga realisasi diperoleh 1.297.549.256 dengan target sebesar 2.383.553.263.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Badan asset dan pendapatan daerah (BAPD) Kabupaten Pasaman Barat. Adapun faktor yang mempengaruhi realisasi perolehan (PBB) pajak bumi dan bangunan menyebabkan PBB tidak pernah mencapai ketentuan sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajak dan subjek pajak bumi dan bangunan setelah adanya perubahan.
- c. Terdapat wajib pajak yang tinggal di luar wilayah kelurahan atau kabupaten Pasaman Barat, sehingga sulit bagi petugas kelurahan untuk menyampaikan SPPT PBB.

Dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang masalah pajak, khususnya masyarakat kelas menengah dan kelas bawah terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak membayar PBB (pajak bumi dan bangunan).

#### **Faktor-faktor yang Menyebabkan Wajib Pajak Bagi yang Tidak Mau Membayar Pajak di Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021**

Hasil wawancara di badan asset dan pendapatan daerah (BAPD) Kabupaten Pasaman Barat dari Narasumber Bapak Gustiman menjelaskan adanya berbagai faktor dan masalah yang menjadi penyebab penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) belum terpenuhi:

- a. Faktor Internal (Pemerintah)
  - 1) Sulit untuk bertemu langsung dengan wajib pajak.
  - 2) Wajib pajak telah pindah dan tidak diketahui alamat wajib pajak.
  - 3) Tidak adanya SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) tepat waktu bagi wajib pajak.
  - 4) Tidak tersampainya SPPT, sehingga jadwal pembayaran pajak tidak ketahui oleh wajib pajak.
- b. Faktor Eksternal (Masyarakat)
  - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap aturan tarif pajak saat membayar pajak.
  - 2) Masih sulitnya memperoleh informasi tentang nomor rekening wajib pajak, dan harta kekayaan wajib pajak dari pihak terkait yang sering kali menimbulkan kesulitan dalam pemungutan wajib pajak.

- 3) Timbulnya sifat tidak bertanggungjawab dalam membayar pajak, sehingga mereka berkesimpulan dikarenakan sibuk dan tidak ada waktu untuk membayar pajak.

### **Analisis Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

PBB (pajak bumi dan bangunan) mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), karena sumber penghasilan daerah berasal dari sektor pajak daerah. Jadi dapat disimpulkan, bahwa naik turunnya (PBB) pajak bumi dan bangunan akan menyebabkan tidak stabil pada pendapatan asli daerah (PAD).

Ditinjau dari perspektif keuangan daerah dimana kemampuan dalam menikmalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat dengan tujuan melihat komposisi penghasilan daerah yang tersedia. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin pula kapasitas tanggung jawab pemerintah daerah dan sebaliknya. Sedangkan Pengaruh pertumbuhan pendapatan PAD masyarakat adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan tersebut melibatkan beberapa industry seperti pembangunan jalan, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dimana dengan PAD yang tinggi, maka pembangunan jalan di daerah Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki salah satu industry terbesar kelapa sawit dapat berjalan dengan lancar. Karena akses menuju lahan kelapa sawit mudah untuk di tempuh, bahan baku dapat di peroleh dengan mudah, dan alat-alat yang dapat menunjang kegiatan industry juga mudah untuk di peroleh serta hasil yang di peroleh mudah untuk di distribusikan kepada masyarakat dengan adanya pembangunan jalan di setiap daerah. Sehingga dengan begitu akan menghasilkan ooutput yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki PAD yang cukup besar, maka dengan PAD yang besar dapat melakukan pembangaunan, salah satunya adalah pembangunan fasilitas umum. Diantaranya adalah fasilitas irigasi, rumah sakit, jembatan, pasar yang representative dan lain sebagainya. Dengan terbangaunnya fasilitas di atas, maka kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Segala kebutuhan akan tersedia, seperti masyarakat yang butuh perawatan secara intensif seperti rumah saki yang mempunyai fasilitas lengkap.

Maka dengan demikian akan menghasilkan output yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah akan semakin mandiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat.

Selain membangaun jalan dan fasilitas umum, Kabupaten Pasaman Barat juga membangun fasilitas lainnya, diantaranya adalah fasilitas social yang meliputi tempat rekreasi, taman bermain, ruang serba guna, tempat olahraga, dan lain sebagainya.

Dengan adanya tempat rekreasi, salah satunya pantai sasak maka Kabupaten Pasaman Barat dapat meningkatkan pendapatan devisa daerah, membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Karena semakin besar pendapatan devisa daerah, maka akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

Pendapatan devisa daerah dapat di peroleh melalui penjualan tiket masuk, parkir motor dan mobil, sewa motor ATV , sewa tempat usaha di area tempat wisata, dan lain sebagainya.

Dan dengan adanya tempat rekreasi juga dapat membuka kesempatan kerja. Semakin banyak pengunjung yang datang ke tempat rekreasi tersebut, maka semakin banyak aktivitas warga setempat dalam melakukan transaksi. Masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tempat rekreasi akan memiliki inisiatif untuk membangun wc umum, rumah makan, tempat menjual aksesoris. Sehingga dengan begitu akan menghasilkan output yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat.

## **KESIMPULAN**

Peran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pertumbuhan ekonomi di Kab. Pasaman Barat masih sanga kecil. Dimana hal ini dapat diteliti dari kontribusi (PBB) pajak bumi dan bangunan terhadap (pendapatan asli daerah) PAD dari tahun 2016-2021 total sebesar 2,4% yang berarti sangat kurang kontribusinya. Hal ini di karenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Kasus ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya tantangan dalam pengiriman (SPPT) surat penagihan pajak terutang oleh pemerintah, kurang di tetapkannya sanksi yang ada sesuai dengan ketentuan dalam UUD PBB. Sehingga dengan demikian Realisasi PBB tidak selalu tercapai. PBB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD, namun kenyataanya PBB sangat rendah. Dimana dapat dilihat bahwa

peran PBB terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dengan penerimaan PAD. Dana PAD akan dilaokasikan untuk kelancaran pembangunan. Contohnya pembangunan jalan, fasilitas umum dan fasilitas lainnya seperti fasilitas sosial.

Ada juga pembangunan yang lancar, maka dapat menghasilkan output dengan baik, sehingga dengan begitu pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Pasaman Barat akan meningkat dengan cepat. Dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Damas Dwi Anggoro, Damas. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017), hlm 21-22
- Mulyani Firdausy, Carunia. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Putong, Iskandar. (2013). *Economics, Pengantar Mikro dan Makro, Edisi Kelima*. Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Press,
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm 9
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

### Wawancara:

- Armawati. 2023. Februari, 24. Personal Interview. “Kepala Bidang Pendapatan II”. Jl. M. Natsir. No. 61 Simpang Ampek Pasaman Barat,
- Armawati. 2023. Maret, 10. Personal Interview. “Kepala Pendapatan II. Jl. M. Natsir No.61 Simpang Ampek, Pasaman Barat
- Gustiman. 2023, Februari, 27. Personal Interview. “Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB” Jl. M. Natsir No.61 Simpang Ampek, Pasaman Barat
- Neldawati. 2023. Februari, 22. Personal Interview. “Sub. Pengembangan PBB dan BPHTB”. Jl. M. Natsir. No. 61 Simpang Ampek Pasaman Barat